



rekayasa

Jurnal Teknologi
Institut Teknologi Nasional - Bandung



rekayasa

Jurnal Teknologi

No 2, Vol. XVIII, April 2014

Pengembangan Konsep Perencanaan Biaya Pemeliharaan Rutin Gedung Pendidikan di Institut Teknologi Bandung 66 - 75
Mia Wimala, Rizal Z. Tamin

Pengolahan Limbah Cair Industri Pulp dan Kertas Kasar secara Biologis Menggunakan Tumbuhan Eceng Gondok (*Eichhornia crassipes* (Mart.) Solm) 76 - 90
Eka Wardhani, Mumu Sutiana, Owen Mehta P.S Hasibuan

Continuum Ruang-Waktu dalam Telaah Kota Pascamodern dan Implikasinya terhadap Perencanaan Kota 91 - 102
Widya Suryadini

Identifikasi Simpul-Simpul Kegiatan Koridor Kawasan Perkotaan Dabo - Desa Jagoh 103 - 111
Sadar Yuni Raharjo, Encik Ryan Pradana Fekri

Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Penataan Ruang Wilayah Pesisir 112 - 125
Sadar Yuni Raharjo, Encik Ryan Pradana Fekri

Kelembagaan Pengelolaan Cagar Budaya (Studi Kasus: Kawasan Pecinan, Kota Siak Sri Indrapura) 126 - 131
Sadar Yuni Raharjo, Ari Moravian, Ferdyka Maros Lumban Tobing

Aplikasi Penjadwalan Terapi pada Sixo Reflexology 132 - 141
Rosalia Hadi, Yohana Nugrahaeni

Penerapan Algoritma Genetika untuk Penjadwalan Mata Pelajaran 142 - 152
Ni Luh Gede Pivin Suwirmayanti, I Made Sudarsana

Pengaruh Penggunaan Polimer Elvaloy Terhadap Nilai Index Kekuatan Sisa Pada Campuran Material Perkerasan Daur Ulang 153 - 159
Rahmi Zurni

Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Penataan Ruang Wilayah Pesisir 160 - 172
Sony Herdiana, Ira Irawati

Tinjauan Potensi Timbulan Kondensat AC sebagai Sumber Alternatif dalam Konservasi Air 173 - 178
Dyah Asri Handayani Taroepratjeka



itenas

Institut Teknologi Nasional

Jl. PHH Mustopha No.23 Bandung 40124

Telp. 022-7272215 Fax. 022-720289

www.itenas.ac.id



ISSN : 1410-3125

SUSUNAN PENGELOLA JURNAL ITENAS REKAYASA

Penerbit:

Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat
Institut Teknologi Nasional

Penanggung Jawab:

Ketua lembaga Penelitian dan pemberdayaan Masyarakat

Ketua Editor
Nursetiawan

Editor :

Mohammad Alexin Putra
Dewi Parlina
Ambar R. Harsono
Eka Wardhani
Yanti Budiyaning
Yusup Miftahuddin
Andre Widura

Administrator Website:
Agus Wardana

Sekretariat/Tata Usaha
Kuswara

Jurnal Itenas Rekayasa (Jurnal Teknologi Institut Teknologi Nasional)
diterbitkan 4 kali dalam satu tahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian
dan kajian analisi di bidang ilmu pengetahuan, dan teknologi.

Alamat redaksi dan tata usaha:

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Institut Teknologi Nasional
Fakultas, gedung 14 Lantai 3

Jl. PHH. Mustapa 23 Bandung 40124

Tlp. 022-7272215 Pes. 158, Fax. 022-7202892, e-mail: lpp@itenas.ac.id



Bentuk dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Aktivitas Penataan Ruang Wilayah Pesisir

Sony Herdiana, Ira Irawati
Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota,
Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ITENAS, Bandung
Email: sony.asgar@gmail.com

ABSTRAK

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pemanfaatan, maupun pengendalian ruang sesuai dengan amanat UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sejalan dengan itu, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengingat pentingnya hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana tingkat dan bentuk partisipasi masyarakat dalam penataan ruang di wilayah pesisir, baik dalam tahap perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian dilihat dari kondisi eksisting dan harapan masyarakat pada masa mendatang. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan sigi lapangan kepada masyarakat di 3 wilayah pesisir yaitu Kabupaten Klungkung, Kabupaten Berau, dan Kabupaten Bulukumba. Data hasil sigi lapangan dianalisis secara kualitatif mengacu kepada teori tingkat partisipasi Goethert yang membagi tingkat partisipasi dalam 5 tingkatan. Hasil analisis menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir secara umum masih berada pada tingkatan 'none' terutama pada kegiatan penataan ruang menyangkut perencanaan yang bersifat lebih makro.

Kata kunci: partisipasi publik, aktivitas penataan ruang, wilayah pesisir

ABSTRACT

Public participation is an important thing in spatial planning due to its final result for their interest. Resulting spatial planning which could give a save, comfortable, productive, and sustainable condition is more valuable if this community is involved in. The legal basis for that is specifically determine in UU No. 26/2007 about Spatial Planning. Furthermore, the contribution of community who lived in the coastal and small island zone itself is accommodated in UU No. 27/2007 about Coastal and Small Island Area. It noted that the aim of this area management is to strengthening public and local government participation; so a justice, balance, and sustainable situation accomplished. This study will describe how is the level of public participation on spatial planning in coastal area in three sample areas, Klungkung, Berau, and Bulukumba. However, the method that is used is public surveys in order to know how the level of participation planning in the area. The level of participation refers to Goethert's participation level that divided into 5 level of participation.

Keywords: public participation, spatial planning activities, coastal area

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil. Pulau-pulau tersebut terhubung oleh laut dan selat yang merupakan wilayah laut nasional dengan luas perairan sekitar 5,8 juta km² serta panjang pantai 79.610 km. Untuk mengelola dan menata wilayah pesisir yang sedemikian luas tentunya tidak cukup hanya mengandalkan peranan pemerintah saja, tetapi juga perlu adanya kesadaran masyarakat untuk selalu berperan aktif sehingga tercipta keseimbangan antara kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta penghormatan terhadap sosial-budaya masyarakat setempat.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebutkan bahwa salah satu tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah untuk memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan. Dengan demikian pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki peranan yang penting dalam upaya tercapainya keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di wilayah tersebut. [1]

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tersebut juga menyebutkan bahwa yang termasuk dalam kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian. Dalam kaitannya dengan penataan ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 ini mengamanatkan penyiapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) berupa rencana tata ruang yang merupakan arahan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang disusun secara selaras dan seimbang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

Dalam penyusunan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, keterlibatan masyarakat menjadi satu hal yang perlu dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan penataan ruang menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hal ini sejalan dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat.[2] Adapun bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat dan juga demi tercapainya tujuan penataan ruang yaitu terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peran masyarakat di bidang penataan ruang.

Meskipun peraturan terkait bentuk dan tata cara peran serta masyarakat dalam penataan ruang telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2010 tersebut, namun dalam praktek di lapangan masih perlu dikaji bentuk dan tata cara peran serta masyarakat yang efektif dan ideal. Peran serta masyarakat dalam penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi sangat penting oleh karena pada wilayah yang lebih kecil dengan skala perencanaan yang lebih besar, maka pelibatan masyarakat menjadi salah satu komponen penting untuk mewujudkan tujuan penataan ruang yang diharapkan. Masyarakat sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah, diharapkan dapat digali segala

potensinya agar mereka bisa mendayagunakan kemampuannya secara aktif sebagai sarana untuk melaksanakan perannya dan sebagai perwujudan dari hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang. Terkait dengan hal tersebut, perlu dikaji bagaimana kondisi eksisting tingkat dan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang di wilayah pesisir pada khususnya sebagai salah satu masukan dalam mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir agar pengelolaan wilayah dapat berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan juga bisa memberdayakan masyarakat lokal itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi eksisting bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam aktivitas penataan ruang wilayah pesisir, khususnya pada tiga lokasi yang menjadi wilayah kajian.

2. METODOLOGI

2.1 Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Persiapan Kunjungan Lapangan, dilakukan dengan pemantapan metodologi dalam pengumpulan data, penyiapan daftar pertanyaan wawancara dan kuesioner, dan responden yang menjadi sampel.
- Kunjungan lapangan, merupakan kegiatan observasi lapangan atas kondisi wilayah, wawancara mendalam dengan aparat pemerintah daerah terkait (termasuk dalam kunjungan instansional), penyebaran kuesioner pada tokoh masyarakat dan atau masyarakat.
- Analisis, dilakukan untuk melihat bentuk dan kondisi peran serta masyarakat, serta hambatan dan kendala dalam peran serta masyarakat.
- Perumusan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil.

2.2 Variabel yang Diamati

Variabel yang diamati dalam kajian ini merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir yang mengacu pada peraturan-peraturan perundangan sebagai berikut:

- PP No 68 th 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang,
- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan
- UU No 27 Th 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Adapun pengamatan atas variabel-variabel tersebut dibagi sesuai dalam tahapan penataan ruang yaitu: a) perencanaan tata ruang, b) pemanfaatan ruang, dan c) pengendalian tata ruang. Adapun ruang yang dimaksud di sini adalah ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berdasarkan perundang-undangan dan tahapan-tahapan dalam penataan ruang tersebut di atas, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang dikembangkan menjadi variabel-variabel yang diamati dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

- Pemberian informasi oleh masyarakat dalam penyusunan RZWP3K dan atau rencana tata ruang;
- Kerja sama yang dilakukan masyarakat dalam penyusunan rencana tata ruang (antara lain sebagai: nara sumber, mitra diskusi, bagian dari tim penyusun; pemberian fasilitas);
- Kegiatan bersama-sama/kerja sama oleh masyarakat dalam pewujudan rencana tata ruang (antara lain : sebagai pelaksana kegiatan, memberikan kontribusi materil dan non materil);

4. Kegiatan mandiri yang dilakukan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan kearifan lokal dan sesuai dengan rencana tata ruang (dalam hal kelestarian lingkungan dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan);
5. Kegiatan investasi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan penataan ruang;
6. Pemantauan pengelolaan ruang oleh masyarakat; dan
7. Pelaporan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan kondisi-kondisi kritis oleh masyarakat (lingkungan, batas negara dan pertahanan keamanan) oleh masyarakat lainnya atau oknum pemerintah atau pihak lain. [3]

2.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data adalah dengan metode survey primer dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Penyebaran kuesioner disebarkan kepada masyarakat dan atau tokoh masyarakat yang tinggal dan atau bekerja di pesisir dan atau pulau-pulau kecil yang terkena dampak dari pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode untuk penetapan sampel adalah non probability sampling, yang biasa digunakan pada penelitian kualitatif di mana jumlah populasi dari penduduk yang tinggal di wilayah pesisir tidak diketahui dengan pasti. Teknik sampling yang digunakan adalah *snowball sampling*, maka jumlah sampel akan berakhir pada saat informasi yang diberikan tidak berbeda dengan informasi dari responden-responden sebelumnya. Oleh karena itu, jumlah sampel di ketiga wilayah studi tidak akan sama, tergantung dari keragaman informasi yang diberikan. Hal ini dilakukan karena keterbatasan waktu dalam pengambilan data primer ini. Namun walaupun demikian, peneliti tetap mempertimbangkan keberagaman latar belakang pekerjaan dan jenis kelamin untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih baik.

Kuesioner ini mengukur kondisi peran serta yang dijalankan dan juga harapan atas peran serta yang diinginkan untuk setiap variabel penelitian. Jenis kuesioner yang diberikan adalah campuran antara kuesioner terbuka dan tertutup. Kuesioner tertutup ditujukan untuk menentukan tingkatan partisipasi responden. Adapun kuesioner terbuka ditujukan untuk menggali alasan atas tingkatan partisipasi yang dijalankan.

Kuesioner disebarkan di wilayah-wilayah pesisir di tiga kabupaten yang menjadi lokasi kajian. Pemilihan wilayah didasarkan pada lokasi yang memiliki aktivitas ekonomi yang cukup besar dan beragam sehingga dimungkinkan diperoleh beragam responden untuk memenuhi keterwakilannya. Terpilih lokasi-lokasi; Desa Kesumba dan Pulau Nusa Lembongan di Kabupaten Klungkung, Pesisir perkotaan Kabupaten Bulukumba dan Tanjung Bira di Kabupaten Bulukumba, serta Pulau Derawan dan Pulau Maratua di Kabupaten Berau. Dengan menggunakan metode *snowball*, diperoleh total responden sebanyak 40 responden dari 3 kabupaten, yaitu sebanyak 15 responden di wilayah pesisir Kabupaten Klungkung, 14 responden di wilayah pesisir Kabupaten Bulukumba, dan 11 responden di wilayah pesisir Kabupaten Berau. Dari keseluruhan responden tersebut mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki dengan usia antara 30 sampai 50 tahun, pekerjaan karyawan dengan pendidikan terakhir lulus Sekolah Dasar (Lihat Tabel 1).

Tabel 1. Karakteristik Responden

Responden	Jenis Kelamin			Umur				Pendapatan	
	Laki-Laki	Perempuan	Total	< 17	17 - 30	30 - 50	> 50	> Rp 1jt	≤ Rp 1jt
Jumlah	32	8	40	1	11	20	8	20	20
Persentase	80	20	100,00	2,5	27,5	50	20	50	50
Responden	Pekerjaan			Karyawan					
	Pelajar	Nelayan/Petani Rumpuk	Pedagang/wirausaha						

		Laut-Garam	wan	
Jumlah	1	11	13	15
Persentase	2,5	27,5	32,5	37,5

Responden	Pendidikan Terakhir				
	Tdk Sekolah	SD	SMP	SMA	SI dst
Jumlah	7	15	5	8	5
Persentase	17,5	37,5	12,5	20	12,5

2.4 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan tingkatan dan bentuk partisipasi masyarakat pada aktivitas penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang datanya telah diperoleh dari hasil survey. Analisis identifikasi tingkat peran serta masyarakat didasarkan pada tingkatan partisipasi masyarakat menurut Goethert (1998) yang membagi tingkat partisipasi masyarakat dalam 5 tingkat partisipasi, yaitu:[4]

1. None / Tanpa Partisipasi

Pihak luar bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh aspek, tanpa keterlibatan dari komunitas. Tingkatan ini terjadi bila kegiatan yang dilaksanakan membutuhkan pengetahuan teknis yang sangat khusus. Tingkatan ini memiliki tingkat resiko tertinggi dalam pelaksanaannya, karena tidak sesuai dengan keinginan komunitas.

2. Indirect / Partisipasi Tidak Langsung

Tingkatan ini hampir sama dengan tingkatan tanpa partisipasi, tapi di sini informasi mengenai situasi lokal diperoleh melalui sumber perantara/kedua (tidak langsung dari komunitas) seperti data hasil sensus dan laporan-laporan. Komunitas dilihat sebagai suatu yang abstrak. Tingkatan ini dapat diberlakukan pada kawasan yang secara potilis cukup stabil dan cukup tersedia informasi. Dua syarat pelaksanaan tingkatan partisipasi ini yaitu (1) kecukupan ketersediaan data, (2) kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data.

3. Consultative / Konsultatif

Pihak luar mengumpulkan informasi secara langsung dari komunitas dan selanjutnya melakukan pengambilan keputusan yang sesuai. Tingkatan ini biasanya dilakukan pada suatu proyek besar yang mempengaruhi komunitas, tapi tidak secara langsung mempengaruhi komunitas tersebut, misalnya pembuatan jalan tol. Pada tingkatan ini partisipasi dengan melibatkan jumlah komunitas yang besar tidak efektif, tapi yang dibutuhkan adalah *feedback* dari sejumlah partisipan. Hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui survei atau wawancara individu.

4. Shared Control / Pengawasan Bersama

Pada tingkatan ini interaksi antara komunitas dan pihak luar dilakukan sesering mungkin. Kedua pihak tersebut merupakan stakeholder yang akan saling berkontribusi melalui interaksi kota atau komunitas yang sangat efektif. Beberapa perbedaan pandangan antara pihak-pihak tersebut akan memberikan pemecahan solusi yang kreatif. Pembentukan grup-grup kecil sebagai perwakilan dari komunitas, untuk memecahkan suatu persoalan akan menjadi lebih efektif lagi, selama anggota dalam grup itu cukup merepresentasikan keberagaman pendapat dan kepentingan dalam komunitas.

5. Full Control / Pengawasan Penuh

Komunitas menjadi dominan dalam tingkatan ini, sedangkan pihak luar menjadi sumber daya yang melakukan pengawasan atau memberikan bantuan teknis bila dibutuhkan. Sebenarnya tingkatan ini bukan merupakan partisipasi tapi lebih pada pemberdayaan komunitas menyeluruh. Pemberdayaan inilah yang sebenarnya menjadi tujuan dari partisipasi, tapi seringkali dalam prakteknya menjadi lebih pada harapan.

Jawaban-jawaban dari responden diarahkan untuk menunjukkan posisi responden pada tingkatan-tingkatan seperti terbagi di atas. Kemudian, jawaban responden akan dikelompokkan sesuai dengan tingkat-tingkat tersebut yang disusun dalam tabel tingkat peran serta masyarakat berdasarkan variabel-variabel yang dinilai. Penentuan tingkat partisipasi ditetapkan berdasarkan kecenderungan pengerucutan jawaban responden sesuai dengan metode snowball.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tingkat Pengetahuan Masyarakat Terhadap RTRW, RZWP3K, dan Program Pembangunan Lainnya di Wilayah Pesisir

Tahap pertama analisis kajian ini adalah mengidentifikasi tingkat pengetahuan masyarakat atas perencanaan-perencanaan dan program pembangunan di wilayah pesisir. Perencanaan dan program-program pembangunan yang ditanyakan kepada responden adalah mengenai RTRW, RZWP3K, dan program-program pembangunan lainnya pada level yang lebih rendah (kecamatan atau desa) yang lebih bersifat pembangunan fisik.

Analisis terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat di tiga wilayah pesisir secara umum masih sangat rendah, terutama terhadap RTRW dan RZWP3K. Sebagian besar responden menyatakan tidak tahu dan tidak pernah mendengar mengenai RTRW. Hal yang sama juga terjadi atas pengetahuan masyarakat terhadap RZWP3K, mayoritas responden menyatakan tidak tahu atau pernah mendengar tetapi tidak tahu tentang apa RZWP3K tersebut.

Demikian juga halnya dengan sosialisasi dan pelibatan masyarakat dalam rapat RTRW maupun RZWP3K. Sebagian besar responden menyatakan tidak tahu adanya sosialisasi atas RTRW maupun RZWP3K. Adapun untuk tingkat keterlibatan dalam rapat-rapat mengenai RTRW maupun RZWP3K, lebih dari 80 % responden menyatakan tidak pernah dilibatkan dalam rapat RTRW maupun RZWP3K.

Kondisi berbeda terjadi atas pengetahuan dan keterlibatan masyarakat dalam program-program lainnya yang bersifat lebih implementatif pembangunan-pembangunan fisik. Tingkat pengetahuan dan keterlibatan masyarakat relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengetahuan dan keterlibatan dalam aktivitas-aktivitas terkait RTRW dan RZWP3K. Mayoritas responden menyatakan tahu akan adanya program-program tersebut dan menyatakan tahu bahwa ada sosialisasi atas program-program ini serta terdapat cukup banyak masyarakat yang menyatakan terlibat dalam kegiatan program-program tersebut (Lihat Tabel 2).

Perbedaan tingkat pengetahuan dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam RTRW dan RZWP3K dengan program-program lainnya dimungkinkan karena dalam tahapan penyusunan rencana atau sosialisasi dari kegiatan penyusunan RTRW maupun RZWP3K keterwakilan masyarakat hanya diwakili oleh segelintir orang. Dengan demikian pengetahuan masyarakat secara umum mengenai tata ruang masih sangat terbatas, berbeda dengan program-program yang secara langsung melibatkan masyarakat terutama yang terkait dengan kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, responden lebih baik pengetahuannya.

Tabel 2. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Perencanaan RTRW, RZWP3K, dan Program Pembangunan Lainnya di Wilayah Pesisir

No	Pengetahuan dan Keterlibatan	Kondisi	Jml Responden / Prosentase	Keterangan atau Alasan
1.	Pengetahuan tentang RTRW	Tidak tahu	72,81%	
		Pernah mendengar, tapi tidak tahu tentang apa	24,96%	
		Tahu	2,22%	
2	Sosialisasi RTRW oleh Pemerintah	Ada	18,30%	Dari dinas pariwisata, LSM, dari dinas tata ruang
		Tidak Ada	25,40 %	
		Tidak Tahu	56,31%	
3	Pelibatan dlm Rapat RTRW	Pernah	14,41%	
		Tidak Pernah	86,59%	
4	Pengetahuan tentang RZWP3K	Tidak tahu	73,62%	
		Pernah mendengar, tapi tidak tahu tentang apa	16,68%	
		Tahu	9,70%	
5	Sosialisasi RZWP3K oleh Pemerintah	Ada	23,19%	
		Tidak Ada	28,15%	
		Tidak Tahu	48,66%	
6	Pelibatan dlm Rapat RZWP3K	Pernah	8,70%	
		Tidak Pernah	91,30%	
7	Pengetahuan tentang Program Pesisir dari pemerintah / organisasi lain	Tidak tahu	12,55%	
		Pernah mendengar, tapi tidak tahu tentang apa	6,98%	
		Tahu	80,46%	
8	Sosialisasi Program Pesisir	Ada	52,18%	
		Tidak Ada	35,27%	
		Tidak Tahu	12,55%	
9	Pelibatan dlm Rapat Program Pesisir	Pernah	39,92%	
		Tidak Pernah	60,38%	

3.2 Kondisi dan Harapan Masyarakat Terhadap RTRW, RZWP3K, dan Program Pembangunan Lainnya di Wilayah Pesisir

Pada bagian ini terdapat dua hal yang dianalisis berdasarkan jawaban responden di 3 wilayah pesisir. Kedua hal tersebut adalah kondisi partisipasi masyarakat dan harapan masyarakat terhadap partisipasi dalam kaitannya dengan penataan ruang maupun program-program lain. Kondisi partisipasi memotret tingkatan peran serta masyarakat secara eksisting, sedangkan harapan partisipasi menggambarkan keinginan masyarakat dalam partisipasi di masa yang akan datang.

Berdasarkan dua hal tersebut di atas, hasil analisis menunjukkan tingkat peran serta masyarakat yang berbeda antara peran serta pada kegiatan penataan ruang (RTRW dan RZWP3K) dengan penataan ruang pada program pembangunan (fisik). Tingkat peran serta masyarakat pada perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang baik pada aspek kondisi maupun aspek harapan sangat rendah pada seluruh variabel. Tingkat partisipasi masyarakat berada pada tingkatan "none" yang artinya tidak pernah berpartisipasi dan di masa yang akan datangpun tidak berkeinginan untuk ikut terlibat berpartisipasi. Hasil analisis tersebut dapat dimengerti karena secara umum pengetahuan masyarakat tentang rencana tata ruang (RTRW dan RZWP3K) dan sosialisasi tata ruang pun masih

sangat rendah, sehingga ketidaktahuan dan ketidakmengertian masyarakat ini membuat kondisi peran serta dan harapan mereka berada pada tingkatan yang sangat rendah.

Berbeda dengan peran serta pada rencana tata ruang, tingkat peran serta masyarakat pada program pembangunan memperlihatkan hasil yang berbeda, di mana peran serta masyarakat sudah terlihat, bahkan sebagian sudah pada tingkat full control. Hal ini sejalan dengan pendapat Conyers (1994), yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai sifat sangat penting karena masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut [5]. Tingkat peran serta masyarakat pada aspek kondisi maupun harapan yang tinggi yaitu mencapai tingkat full control terdapat pada 4 (empat) variabel yaitu variabel bekerja sama dengan pihak lain, pemanfaatan ruang yang sesuai, kegiatan investasi, dan pemantauan. Namun hal yang sangat baik tersebut tidak terjadi pada variabel melaporkan penyimpangan karena baik di aspek kondisi maupun harapan keduanya pada tingkatan peran serta 'none'.

Kondisi cukup baik terjadi pada variabel melakukan kegiatan bersama, karena kondisi peran serta sudah pada tingkat consultative walaupun harapan partisipasinya juga baru pada tingkatan yang sama. Adapun variabel pemberian informasi, walaupun kondisi peran serta ini masih di tingkat paling rendah yaitu 'none' tetapi mempunyai harapan lebih tinggi yaitu 'full control' (Lihat Tabel 3).

Tabel 3. Tingkat Peran Serta Masyarakat pada Kondisi dan Harapan dalam Penataan Ruang di Wilayah Pesisir

No	Variabel Peran Serta	Jenis Tingkat Peran Serta	Tingkat Peran Serta pada			
			Rencana Tata Ruang		Program Pemb.	
			Kondisi	Harapan	Kondisi	Harapan
1	memberikan informasi dalam penyusunan	None	v	v	v	
		Indirect				
		Consultative				
		Shared Control				
		Full Control				v
2	bekerja sama dengan pemerintah atau pihak lain dalam penyusunan rencana tata ruang atau program sejenis	None	v	v		
		Indirect				
		Consultative				
		Shared Control				
		Full Control			v	v
3	Melakukan kegiatan bersama dengan pemerintah atau pihak lain	None	v	v		
		Indirect				
		Consultative			v	v
		Shared Control				
		Full Control				
4	pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal & yang sesuai dengan rencana tata ruang	None	v	v		
		Indirect				
		Consultative				
		Shared Control				
		Full Control			v	v
5	kegiatan investasi sesuai dengan penataan ruang/rencana tata ruang/peraturan yang berlaku	None	v	v		
		Indirect				
		Consultative				
		Shared Control				
		Full Control			v	v
6	memantau pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir YB	None	v	v		
		Indirect				
		Consultative				
		Shared Control				
		Full Control				

No	Variabel Peran Serta direncanakan pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat/ pihak lain	Jenis Tingkat Peran Serta	Tingkat Peran Serta pada			
			Rencana Tata Ruang		Program Pemb.	
			Kondisi	Harapan	Kondisi	Harapan
		Full Control			v	v
7	melaporkan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang dan kondisi-kondisi kritis	None	v	v	v	v
		Indirect				
		Consultative				
		Shared Control				
		Full Control				

3.3 Bentuk Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang

Sesuai dengan hasil analisis yang menunjukkan adanya peran serta masyarakat terutama dalam program-program pembangun, dapat diidentifikasi bentuk-bentuk peran serta masyarakat di ketiga wilayah pesisir. Bentuk peran serta masyarakat dalam penataan ruang dan dalam program pembangunan di ketiga wilayah pesisir memiliki bentuk yang cukup berbeda, di Kabupaten Klungkung bentuk peran serta lebih beragam dengan bentuk yang lebih tinggi muatannya misal dengan mejadi fasilitator dan pembuatan proposal. Salah satu alasan dari tingkat partisipasi yang lebih tinggi di Kabupaten Klungkung karena keberadaan fasilitator atau peran LSM yang pernah memberikan kesempatan pengembangan kapasitas bagi warganya, demikian pula kerja sama LSM tersebut dengan pemerintah.

Adapun di Kabupaten Berau bentuk partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh fungsi wilayahnya sebagai wilayah konservasi sehingga keterlibatan masyarakat banyak ke arah hal tersebut, dengan variasi bentuk peran serta cukup variatif walaupun tidak seperti yang terjadi di Klungkung. Hal ini juga salah satu alasannya adalah karena wilayah ini pernah dibantu oleh LSM untuk pemahaman konservasi dan peran sertanya. Namun sayangnya, di Kabupaten Bulukumba bentuk peran sertanya tidak banyak terungkap. Adapun bentuk peran serta yang terbanyak adalah dalam bentuk rapat. Tabel 4 di bawah ini menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat di ketiga kabupaten kajian.

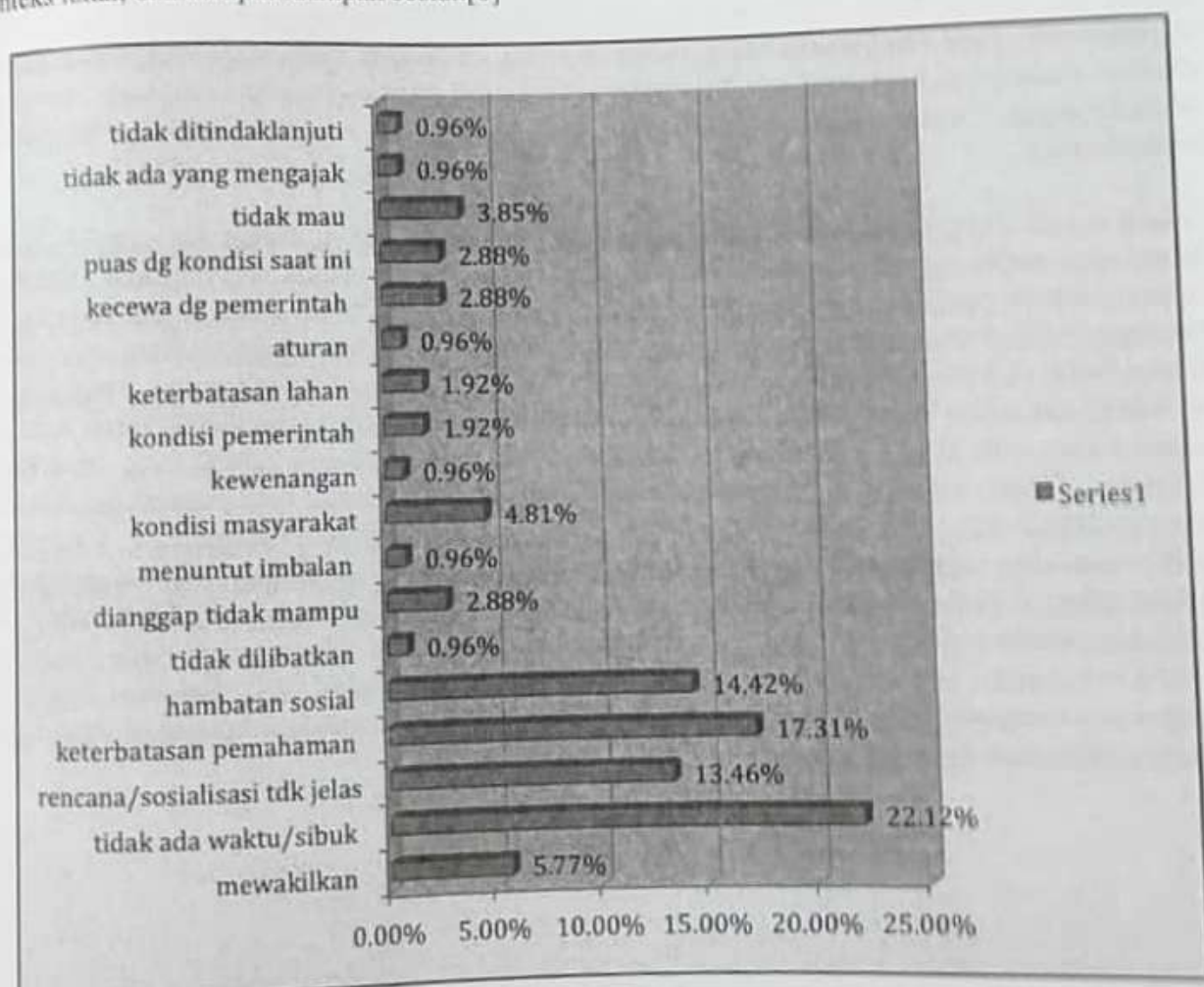
Tabel 4. Bentuk Peran Serta Masyarakat di Ketiga Wilayah Pesisir

No	Penataan Ruang	Bentuk Peran Serta
1	Pemberian Informasi	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Rapat, penyusunan proposal, mengikuti penyuluhan
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> penyuluhan oleh dinas perikanan, rapat,
		<i>Kabupaten Berau:</i> Rapat
2	Bekerja sama	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Rapat, pelatihan, menjadi fasilitator, terlibat dalam pembangunan jalan, penyusunan proposal, diskusi penetapan keputusan
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> Kegiatan menenun
		<i>Kabupaten Berau:</i> Melihat dan menunjukkan kawasan lindung,

No	Penataan Ruang	Bentuk Peran Serta
3	Kegiatan Bersama	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Pelatihan memasak, terlibat dalam kegiatan di Banjar, mengaspal jalan, budidaya, rapat
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> -
		<i>Kabupaten Berau:</i> Penanaman bakau, menjadi buruh, penumbuhan terumbu karang, pengembangan ekowisata,
4	Pemanfaatan Ruang yang sesuai.	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Pengarahan investasi, berjualan di tempat yang sesuai, mengikuti aturan- karena ada hukum dimasukkan ke UU adat tentang sanksi dengan membayar atau tenaga, adapula sanksi sosial sd diusir, pembangunan <i>cool storage</i> , Membuat awig-awig (dalam AD ART berupa norma untuk kegiatan penangkapan, untuk batu sikat awit-awit (tidak tertulis, norma), mengikuti peraturan karena kepentingan wisata lebih penting.
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> Bakti laut
		<i>Kabupaten Berau:</i> Melakukan penangkapan ikan di tempat yang tidak dilarang, peninjauan terumbu karang, pengembangan ekowisata,
5	Investasi	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Memasarkan rumput laut, buka usaha totok, mengikuti awig-awig, donasi kegiatan sosial, pembentukan koperasi, mengikuti sesuai leluhur,
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> -
		<i>Kabupaten Berau:</i> Membuat spot <i>snorkeling</i> ,
6	Pemantauan	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Turut menjaga kebersihan, bila diberitahu bandel baru dilaporkan, informasi antar kelompok masyarakat, memberi info ke pemerintah tentang abrasi
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> -
		<i>Kabupaten Berau:</i> Melihat/memantau secara langsung, menjaga terumbu karang, hanya memperhatikan saja, melihat-lihat saja perkembangannya
7	Pelaporan	<i>Kabupaten Klungkung:</i> Pelaporan lewat aparat desa, melaporkan pengeboman ikan, melaporkan bila parah, menegur orangnya/pelaku, bila pendatang dilaporkan.
		<i>Kabupaten Bulukumba:</i> Dilaporkan ke guru kelas,
		<i>Kabupaten Berau:</i> Melaporkan langsung ke aparat

3.4 Kendala dalam Peran Serta Masyarakat

Rendahnya level partisipasi masyarakat pesisir dalam penataan ruang terjadi karena adanya kendala-kendala yang menghambat masyarakat untuk bisa terlibat aktif. Berdasarkan hasil analisis jawaban responden, terdapat 4 (empat) kendala utama dalam keterlibatan masyarakat dalam penataan ruang maupun dalam program pembangunan lainnya, bila diurutkan dari yang paling utama adalah: 1) tidak ada waktu/sibuk, 2) keterbatasan pemahaman, 3) hambatan sosial, dan 4) rencana/sosialisasi tidak jelas. Dari jawaban tersebut dapat dilihat bahwa secara umum hambatan yang terjadi adalah kombinasi dari faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi masyarakat pesisir yang kebanyakan berpendapatan rendah membuat mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja, waktu mereka hampir dihabiskan semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, alasan ini menjadi alasan utama masyarakat tidak terlibat dalam kegiatan penataan ruang. Selain itu, kondisi pendidikan yang tidak terlalu tinggi juga membuat masyarakat pesisir tidak cukup percaya diri untuk ikut berpartisipasi. Mereka lebih mempercayakan segala sesuatunya kepada yang dianggap lebih mampu, pimpinan wilayah atau pimpinan adat. Adapun untuk faktor eksternal, kurangnya sosialisasi atau sosialisasi yang tidak tepat sasaran membuat masyarakat tidak paham dan bahkan tidak tahu akan program-program penataan ruang (Lihat Gambar 1). Hal ini tidak sejalan dengan definisi partisipasi menurut FAO (2003) yaitu partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.[6]



Gambar 1, Persentase Alasan Kendala dalam Berperan Serta dalam Perencanaan Tata Ruang dan Program Pembangunan di Wilayah Pesisir di Ketiga Wilayah Pesisir

4. SIMPULAN

Partisipasi masyarakat pada tiga wilayah kajian secara umum sudah ada dalam kegiatan penataan ruang, namun demikian, intensitas partisipasi masyarakat yang saat ini terjadi belum menunjukkan kuantitas dan kualitas yang cukup baik. Partisipasi masih dilakukan secara sporadis dengan kuantitas yang rendah dan lebih untuk memenuhi kewajiban formal yang diminta oleh aparat pemerintah atau dikarenakan adanya kepentingan secara langsung dari masyarakat khususnya yang terkait dengan kepentingan ekonomi, misalnya kerusakan lingkungan yang bisa mengganggu mata pencaharian masyarakat. Salah satu faktor yang membuat rendahnya partisipasi masyarakat dalam penataan ruang adalah tingkat pengetahuan mayoritas masyarakat atas penataan ruang itu sendiri. Sebagian besar tidak memahami dan bahkan tidak mengetahui hal yang terkait dengan penataan ruang. Hal tersebut membuat mayoritas masyarakat menjadi inferior dan tidak mempunyai kepercayaan diri untuk terlibat dalam kegiatan penataan ruang.

Intensitas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang merupakan hasil dari kolaborasi para pihak yang terlibat dalam penataan ruang, tidak hanya kesadaran ataupun kemauan masyarakat semata untuk ikut terlibat. Hasil analisis dari tiga wilayah sampel dalam kajian ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dan pendampingan yang tepat dari lembaga swadaya masyarakat dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas partisipasi masyarakat dalam penataan ruang. Selain itu, tatanan dan struktur sosial masyarakat di suatu daerah memberikan pengaruh terhadap intensitas dan kualitas peran serta masyarakat dalam penataan ruang. Kelompok masyarakat yang sudah memiliki struktur sosial yang kuat baik struktur dalam konteks adat maupun struktur keagamaan mempunyai kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dan mempunyai kesadaran untuk bersama-sama berpartisipasi.

Secara umum, di tiga kabupaten yang menjadi sampel dalam kajian ini tingkat partisipasi masyarakat dalam penataan ruang wilayah pesisir untuk kondisi faktual saat ini berada pada tingkatan 'None' pada semua variabel peran serta masyarakat. Tingkat partisipasi none ini terutama terjadi pada kegiatan penataan ruang menyangkut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota atau Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang bersifat lebih makro. Tingkatan none ini mengindikasikan keterlibatan masyarakat hampir tidak ada atau sangat kecil. Peran serta yang terjadi hanya dilakukan oleh minoritas masyarakat secara sporadis atas hal-hal yang lebih bersifat individual. Dalam kondisi ini masyarakat belum memiliki kuasa untuk turut menentukan kebijakan atas penataan ruang. Namun demikian, pada level kegiatan 'program pembangunan' yang sifatnya lebih mikro dan langsung di masyarakat ada perbedaan tingkat partisipasi yang cukup signifikan dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada penataan ruang yang lingkungannya lebih makro. Pada 'program pembangunan' ini tingkat partisipasi masyarakat dapat dikategorikan pada tingkat 'full control' terutama pada variabel kerjasama, pemanfaatan, pemantauan dan pelaporan. Tingkat full control ini mengindikasikan ada peranan masyarakat dalam menentukan kebijakan yang diambil dalam pelaksanaan program kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang No 27 Th 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- [2] Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- [3] Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- [4] Ivo, Imparato, dan Ruster, Jeff. 2003. *Slum Upgrading and Participation: Lesson from Latin America*. The World Bank. Washington, D.C
- [5] Conyers, Diana, 1994, *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga: Suatu Pengantar*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- [6] Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemahan Matheos Nalle, Yayasan Obor, Jakarta.